

Peran Greenpeace Dalam Menghadapi dampak *Food Estate* di Kalimantan Tengah 2020

Jodhi Aulia Rahman¹ Tendy²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstrak: Program Food Estate merupakan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi terhadap ancaman krisis pangan, terutama di masa pandemi COVID-19. Namun, implementasinya di Kalimantan Tengah justru memunculkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, degradasi lahan gambut, konflik lahan, dan marginalisasi masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Greenpeace sebagai aktor transnasional dalam menghadapi dampak negatif dari program tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) oleh Keck & Sikkink, penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace menjalankan advokasinya melalui taktik *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*. Melalui investigasi lapangan, kampanye media, serta kerja sama dengan organisasi lokal dan internasional, Greenpeace berhasil mengangkat isu lokal ke tingkat global. Temuan ini menunjukkan bahwa NGO seperti Greenpeace memiliki peran strategis dalam mendorong akuntabilitas kebijakan pembangunan dan memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat terdampak.

Kata kunci: Greenpeace, Food Estate, Kalimantan Tengah, Transnational Advocacy Network, advokasi lingkungan.

Abstract: The Food Estate program is a national strategic project initiated by the Indonesian government as a solution to the threat of a food crisis, particularly during the COVID-19 pandemic. However, its implementation in Central Kalimantan has triggered various environmental and social issues, including deforestation, peatland degradation, land conflicts, and the marginalization of indigenous communities. This study aims to analyze the role of Greenpeace as a transnational actor in addressing the negative impacts of the program. Using a qualitative approach and the concept of Transnational Advocacy Network (TAN) by Keck & Sikkink, the research reveals that Greenpeace carried out its advocacy through information politics, symbolic politics, and leverage politics. Through field investigations, media campaigns, and collaboration with both local and international organizations, Greenpeace effectively brought local issues to global attention. The findings indicate that NGOs like Greenpeace play a strategic role in promoting policy accountability and advocating for ecological and social justice for affected communities.

Keywords: Greenpeace, Food Estate, Central Kalimantan, Transnational Advocacy Network, environmental advocacy.

PENDAHULUAN

Food Estate merupakan program pertanian skala besar yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya sebagai respons terhadap krisis pangan global yang dipicu oleh pandemi

¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
E-mail : jodhiaulia@gmail.com.

²Dosen Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

COVID-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 24 Tahun 2020, Food Estate diartikan sebagai pengelolaan kawasan hutan untuk budidaya tanaman pangan secara terintegrasi, mencakup sektor pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan (Greenpeace Indonesia, 2022). Program ini secara resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 109 Tahun 2020, yang sekaligus menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi (Liputan 6, 2024). Program ini dibentuk dengan tujuan untuk mengantisipasi permintaan pangan dunia yang melonjak seiring dengan pertumbuhan penduduk, suplai yang tidak sebanding dengan permintaan, lajunya alih fungsi lahan pertanian serta untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor (Mongabay, 2020)

Salah satu daerah pelaksanaan utama program ini adalah Kalimantan Tengah, khususnya di kawasan bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) era Orde Baru yang kemudian akan dikembangkan di beberapa daerah lain seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Papua (Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan & Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, 2020). Kawasan ini dipilih karena memiliki potensi lahan rawa yang luas, jaringan irigasi peninggalan PLG, serta kepadatan penduduk yang rendah (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020). Namun, meskipun tujuan program ini terlihat positif, pelaksanaannya justru menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari sisi lingkungan maupun sosial (Kompas.com, 2021).

Dalam menghadapi berbagai permasalahan ini, organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Greenpeace mengambil peran aktif. Greenpeace sebagai aktor transnasional dalam bidang lingkungan tidak hanya mengkritik program Food Estate secara publik, tetapi juga melakukan investigasi lapangan, mendokumentasikan dampak yang terjadi, serta membangun koalisi dengan organisasi lokal seperti WALHI, Save Our Borneo, dan LBH Kalimantan Tengah. Greenpeace berupaya menyuarakan isu-isu lingkungan dan hak masyarakat lokal ke tingkat global melalui berbagai saluran kampanye, data ilmiah, dan tekanan diplomatik.

Kerangka Teori

Konsep Transnational Advocacy Network (TAN)

Penulis menggunakan konsep TAN (*Transnational Advocacy Network*) oleh yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. Dalam konsep tersebut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink mengemukakan organisasi bergerak dengan kekuatan informasi, ide dan strategi yang dikumpulkan dari anggota-anggotanya untuk mengubah informasi dan konteks nilai yang digunakan oleh negara dalam membuat kebijakan. Hal ini disebabkan jaringan ini tidak memiliki kekuatan tradisional dan sebesar negara. Beberapa taktik utama dalam konsep tersebut yaitu (Keck & Sikkink, 1999):

- a. *Information politics*, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi secara cepat dan kredibel untuk digunakan secara maksimal.
- b. *Symbolic politics*, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol aksi ataupun narasi yang masuk akal guna mempengaruhi khalayak.
- c. *Leverage politics*, yaitu kemampuan untuk membuat aktor yang memiliki kekuatan mempengaruhi aktor sasaran dimana jaringan sendiri lemah atau tidak mempunyai pengaruh.
- d. *Accountability politics*, yaitu upaya untuk membuat aktor yang lebih berkuasa berkomitmen untuk bertindak didasarkan pada prinsip atau kebijakan yang diusung jaringan ini.

Berdasarkan konsep *Transnational advocacy network*, peran Greenpeace pada program *food estate* terjadi melalui pertukaran, pengolahan informasi serta menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi lokal. Peran tersebut kemudian dapat dianalisis melalui taktik – taktik yang terdapat dalam konsep transnational advocacy network.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan hal-hal yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menghadapi dampak dari program *Food estate* di Kalimantan Tengah. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berasal dari catatan, penelitian terdahulu, akademik, buku, opini, publikasi, surat kabar serta situs web yang menyediakan informasi dan data yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang berfokus pada konsep atau masalah dalam bentuk tulisan dan tidak disertai dengan data angka.

Hasil dan Pembahasan

a. Sejarah Greenpeace

Greenpeace adalah organisasi lingkungan internasional yang didirikan pada tahun 1971 oleh sekelompok aktivis di Vancouver, Kanada. Gerakan ini bermula dari aksi protes terhadap uji coba nuklir Amerika Serikat di Pulau Amchitka, Alaska, yang dilakukan dengan berlayar menggunakan kapal *Phyllis Cormack* yang kemudian berganti menjadi "Greenpeace" sebagai nama baru untuk pelayaran tersebut (Greenpeace, 2007). Nama "Greenpeace" mencerminkan semangat perdamaian dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Aksi perdana Greenpeace menarik perhatian publik dan menjadi titik awal lahirnya salah satu organisasi lingkungan terbesar di dunia. Seiring perkembangan waktu, Greenpeace mengubah pendekatannya dari aksi *civil disobedience* menjadi strategi kampanye berbasis data ilmiah, edukasi publik, pelobi kebijakan, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Mereka tetap mempertahankan prinsip tanpa kekerasan dalam seluruh aktivitasnya (Susanto, 2007).

Saat ini, Greenpeace telah berkembang menjadi jaringan global yang terdiri dari 26 organisasi nasional dan regional di lebih dari 55 negara, dengan lebih dari 2,8 juta pendukung di seluruh dunia (Greenpeace, 2022). Organisasi ini berfokus pada isu-isu lingkungan utama seperti perubahan iklim, deforestasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan polusi, serta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga bumi dari kerusakan lebih lanjut.

b. Sejarah Food Estate

Konsep *Food Estate* bukanlah kebijakan baru di Indonesia. Sejak era Orde Baru, program ini telah digunakan sebagai strategi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan pertanian skala besar. Tujuan utamanya adalah menjamin ketersediaan pangan nasional di tengah berbagai tantangan seperti pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian, krisis iklim, dan fluktuasi harga global.

Dasar dari praktik *food estate* di era Jokowi adalah ancaman krisis pangan yang disebabkan tingginya pertumbuhan penduduk, terbatasnya lahan pertanian, akses air bersih yang sulit dan perubahan iklim (Neilson & Wright, 2017). Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) krisis pangan terjadi ketika salah satu atau lebih dari pilar ketahanan pangan terganggu secara signifikan sehingga mengancam

kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses pangan yang cukup, aman dan bergizi. 4 pilar utama ketahanan pangan tersebut ialah 1) *Food Availability*; 2) *Food Access*; 3) *Food Utilization*; 4) *Food Stability* (Global Food Security Cluster, 2023).

Pandemi Covid-19 menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan krisis pangan. Pembatasan sosial yang dilakukan berdampak pada terganggunya rantai suplai pangan, pembatasan gerak dan aksesibilitas membuat fluktuasi harga tak menentu yang berimbas pada produktivitas petani dan hasil panen (Rozaki, 2020). Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan beragam kebijakan dan program yang ditujukan meningkatkan ketahanan pangan diantaranya adalah *food estate*. Program ini dibuat untuk mengantisipasi krisis pangan seperti prediksi Food and Agriculture Organization (FAO) dengan menjadikannya sebagai pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis bagi negara (Ardi Saputra, 2021).

1) *Food Estate* era Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, konsep *food estate* diwujudkan melalui proyek Mega Rice Project (MRP) atau Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) yang diluncurkan pada tahun 1995 berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 1995. Proyek ini bertujuan untuk mencetak lahan pertanian baru seluas 1,1 juta hektar di Kalimantan Tengah, khususnya untuk tanaman pangan seperti padi, sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan nasional (Rasman et al., 2023). Namun, pelaksanaan proyek ini mengalami kegagalan karena tidak mempertimbangkan karakteristik ekologis lahan gambut yang tidak cocok untuk pertanian intensif. Sistem irigasi yang dirancang justru membelah kubah gambut dan menyebabkan penurunan fungsi kubah gambut untuk menyimpan air, kerusakan dan mempercepat gambut mengering membuatnya rawan kebakaran (Page, S. E., et al., 2011) serta memicu penebangan pohon di hutan rawa gambut yang berimbas pada daya serap tanah berkurang, banjir pada musim hujan, kering dan mudah terbakar saat musim kemarau dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. (Suriadikarta, 2009).

Dari sisi sosial, proyek PLG menyebabkan masyarakat lokal kehilangan sumber penghidupan tradisional seperti rotan, karet, tanaman obat, dan hasil buruan (Galudra et al., 2010). Hak masyarakat adat atas tanah tidak diakui, dan warga transmigran yang didatangkan tidak mendapatkan sarana dan prasarana

memadai (Potter, L., 2009). Pemerintah juga mengabaikan sistem tata ruang adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Karena berbagai dampak negatif ini, proyek PLG dinyatakan gagal dan dihentikan melalui Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1999 (Suriadikarta, 2009). Kegagalan ini menjadi pelajaran penting tentang konsekuensi kebijakan pembangunan pangan yang tidak memperhatikan daya dukung ekologis, sosial, dan budaya lokal.

2) **Food Estate** era Susilo Bambang Yudhono

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program food estate kembali dijalankan melalui dua proyek besar, yaitu: di Papua dan **Delta Kayan Food Estate (DeKaFe)** di Kalimantan Utara.

- a. **Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)**, diluncurkan tahun 2010 sebagai bagian dari percepatan pembangunan di Papua, dengan tujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat (Rasman et al., 2023). Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini menimbulkan banyak kontroversi karena lebih dari 90% dari 1,28 juta hektar lahannya berasal dari kawasan hutan adat yang dikonversi menjadi lahan agrobisnis untuk kepentingan industri kayu, kelapa sawit, dan tebu. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan seperti hutan, air bersih, makanan pokok (sagu), dan lahan berburu (Carebesth & Bahari, 2012). Meskipun disebut sebagai “kawasan pangan dan energi”, namun sebagian besar dari MIFEE merupakan proyek yang ditujukan untuk industri perkebunan lebih dari 970.000 hektar, sebagian besar merupakan industri pengolahan kayu, kelapa sawit, tebu dan hanya sebagian kecil untuk produksi pangan. Hal ini memicu konflik agraria antara masyarakat lokal dan investor karena perkebunan tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan adat (Ginting & Pye, 2013).
- b. **Delta Kayan Food Estate (DeKaFe)**, proyek DeKaFe yang dimulai tahun 2011 di Bulungan, Kalimantan Utara dengan luas wilayah 50.000 hektar di Tanjung Palas, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Selor. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui integrasi pertanian, pengelolaan industri, perumahan, jalan serta irigasi modern yang membentuk suatu sistem yang tertata dengan baik (Setyo & Elly, 2018). Namun,

proyek ini juga mengalami kegagalan karena tantangan teknis seperti buruknya sistem irigasi, tingginya kadar asam tanah, serta intrusi air laut. Varietas padi unggul yang dipilih pemerintah tidak sesuai dengan karakteristik lahan, sehingga gagal memberikan hasil optimal. Di sisi lain, pembukaan lahan untuk proyek ini juga menimbulkan konflik dengan masyarakat adat terkait hak atas tanah dan perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan (Kamin & Altamaha, 2019). Secara umum, kedua proyek food estate di era SBY ini memperlihatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat lokal, program ketahanan pangan berskala besar berisiko menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial yang serius.

3) Food Estate era Jokowi

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, proyek baru dengan nama Food Estate kembali di gagas untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan mengantisipasi krisis pangan yang mungkin terjadi di sebabkan oleh pandemi Covid-19 sebagai respon peringatan oleh FAO Maret 2020 tentang ancaman krisis pangan dunia. Seiring dengan penyebaran Covid-19 di dunia tak terkecuali Indonesia, salah satu isu yang menjadi perhatian terkait covid adalah masalah Pangan. Tanpa ketahanan Pangan, masyarakat berada dalam kerawanan dalam memenuhi kebutuhan dasar atas makanan. Pandemi Covid-19 telah mengganggu sistem pangan nasional terutama di masa awal pandemi. Produksi pertanian dalam negeri mengalami penyusutan sekitar 6,2% dan lapangan pekerjaan di bidang pertanian pun berkurang hingga 4,87%. Persentase pangan yang di Impor juga mengalami penurunan sekitar 17,11% dengan harga yang berkisar 1,20% – 2,24%. Karena itu menurunnya produksi pangan dalam negeri berakibat pada kekurangan pangan, di sisi lain inflasi mulai terjadi karena naiknya harga pangan dunia (Dwiguna & Munandar, 2020). Program Food Estate atau Lumbung pangan mulai berjalan di kawasan eks PLG (Proyek Lahan Gambut) yang mengalami kegagalan pada tahun 1995 masa pemerintahan Soeharto dan diikuti pengumuman rencana di daerah-daerah lain. Proyek ini merupakan salah satu ujung tombak dalam strategi untuk mengatasi krisis pangan di masa pandemi Covid-19.

Proyek ini dirancang secara terintegrasi antara aktivitas pertanian, pengelolaan peternakan serta perikanan dalam skala besar. *Food estate* diharapkan mampu

meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan dengan mengadopsi teknologi modern, sistem irigasi canggih dan penggunaan bibit unggul. (Masterplandes.com, 2025). Pengembangan proyek *food estate* ini dilatar belakangi oleh melonjaknya permintaan pangan dunia yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, ancaman krisis pangan global, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian (khususnya di pulau Jawa dan Bali), serta peningkatan kebutuhan pangan nasional. (Analisadaily.com, 2024).

c) Peran Greenpeace sebagai aktor transnasional dalam menghadapi dampak *food estate*

Greenpeace berperan sebagai aktor transnasional yang aktif dalam mengadvokasi isu lingkungan dan sosial yang muncul akibat proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Greenpeace berkoalisi dengan organisasi lokal seperti Pantau Gambut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Tengah, dan Save Our Borneo untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek *food estate* karena dinilai tergesa-gesa, minim partisipasi publik dan mengabaikan daya dukung ekologis lahan (Greenpeace.co.id, 2020). Dengan menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Network* (TAN) dari Keck & Sikkink yang menjelaskan bagaimana organisasi dapat menyuarakan isu lokal ke tingkat internasional melalui jaringan advokasi lintas negara (Keck & Sikkink, 1999), peran Greenpeace dianalisis melalui taktik - taktik utama: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dalam taktik *information politics*, Greenpeace melakukan investigasi lapangan dan menerbitkan laporan berjudul "*Food Estate: Menanam Kehancuran, Menuai Krisis Iklim*", serta membuat situs interaktif "*Kuak Katak di Musim Kering*" yang memuat data visual, peta, dan testimoni warga lokal mengenai kerusakan lingkungan dan konflik lahan.

1. *Information Politics*: Produksi dan Diseminasi informasi; Greenpeace mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi kredibel terkait dampak program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Melalui investigasi lapangan, wawancara dengan masyarakat terdampak, dan analisis citra satelit, Greenpeace memproduksi laporan berjudul "*Food Estate: Menanam Kehancuran, Menuai Krisis Iklim*" yang membongkar dampak negatif seperti degradasi lahan gambut, gagal panen akibat kesalahan pemilihan varietas tanaman, serta hilangnya hak

dan akses masyarakat adat terhadap tanah dan sumber pangan (Greenpeace Indonesia, 2022). Selain itu, Greenpeace juga meluncurkan situs interaktif "*Kuak Katak di Musim Kering*" yang menampilkan data visual, peta, dan narasi warga sebagai upaya memperkuat penyebaran informasi secara lebih menarik dan mudah diakses publik *estate* (Greenpeace.co.id, 2023). Informasi ini menjadi dasar untuk membentuk opini publik, mengkritisi narasi resmi pemerintah, dan mengangkat isu lokal ke tingkat nasional maupun global.

2. *Symbolic Politics*: Membangun Narasi Keadilan Ekologis; Greenpeace membangun narasi keadilan ekologis melalui simbol, aksi visual, dan kampanye media yang menggugah emosi publik. Greenpeace mengangkat suara masyarakat lokal, petani kecil sebagai korban pembangunan yang tidak partisipatif, dirancang dan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat (Kompas.com, 2023) melalui berbagai media seperti video dokumenter berjudul "*Deforestasi Food Estate Jokowi: Hutan Rusak, Banjir di Desa-Desa*", yang menampilkan testimoni warga, citra satelit, dan gambaran lahan pertanian yang gagal panen. Greenpeace juga menggelar aksi bentang spanduk raksasa bertuliskan "*Food Estate Feeding Climate Crisis*" di lahan bekas proyek sebagai sindiran terhadap klaim pemerintah. Greenpeace ingin menunjukkan kepada dunia bahwa proyek food estate Indonesia tidak hanya gagal secara ekologis dan sosial, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap krisis iklim global (Greenpeace Indonesia, 2022). Selain itu, aksi teatrikal berjudul "*Makan Siang Presiden dan Tiga Capres*" dilakukan di tengah lahan food estate yang gersang, menggambarkan ironi antara janji ketahanan pangan dan kenyataan di lapangan. Aksi ini ingin menyuarakan bahwa food estate bukanlah solusi ketahanan pangan, malah justru memperparah krisis pangan dan iklim (Saveourborneo.org, 2023). Simbol-simbol tersebut digunakan untuk memperkuat kesadaran publik bahwa proyek ini tidak hanya gagal secara ekologis, tetapi juga merugikan hak-hak masyarakat lokal dan memperparah krisis iklim.
3. *Leverage Politics*: Membangun Tekanan Melalui Aliansi dan Forum Global; Greenpeace memanfaatkan dukungan dari aktor internasional, media global, dan forum multilateral untuk membangun tekanan terhadap pemerintah Indonesia terkait proyek Food Estate. Greenpeace membawa isu ini ke ranah global, terutama dalam forum iklim internasional seperti COP27 dan COP28. Dalam forum tersebut, perwakilan Greenpeace menyuarakan bahwa proyek Food Estate tidak

hanya mengancam lingkungan dan masyarakat lokal, keanekaragaman hayati serta memperburuk krisis iklim (Dw Indonesia, 2022) serta bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement (Greenpeace International, 2022). Bersama dengan itu, Greenpeace bersama WALHI, Save Our Borneo, dan LBH Palangkaraya melakukan aksi bentang spanduk “*Food Estate Feeding Climate Crisis*” di lokasi proyek sebagai bentuk kampanye visual yang menguatkan tekanan moral dan diplomatik. Melalui laporan dan advokasi internasional, Greenpeace menyoroti pembukaan lahan gambut dan hutan primer yang memperburuk krisis iklim serta menghilangkan ruang hidup masyarakat adat. Strategi ini bertujuan memermalukan negara di mata dunia internasional, membangun skeptisisme terhadap narasi “*Green development*”, serta mempersulit posisi diplomatik Indonesia dalam isu pendanaan iklim dan transisi energi (SEIJ.or.id, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab – bab sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa Greenpeace memainkan peran penting sebagai aktor transnasional di bidang lingkungan dalam mengangkat isu proyek *food estate* di Kalimantan Tengah ke publik dengan kekuatan jaringan dan informasi. Penulis melihat peran tersebut melalui konsep *Transnasional Advocacy Network* (TAN) yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink (1998) yaitu dengan memanfaatkan kekuatan jaringan internasional, data ilmiah dan tekanan moral-politik terhadap aktor negara.

Greenpeace menggabungkan pendekatan berbasis data, kampanye dan aksi lapangan untuk mengangkat isu lokal menjadi perhatian global. Dalam melaksanakan advokasinya, Greenpeace menerapkan taktik utama dalam konsep TAN, yaitu :

- 1) *Information Politics*; Greenpeace mengumpulkan dan menyebarluaskan data lapangan mengenai dampak ekologis dan sosial proyek *food estate* melalui penyusunan laporan investigatif “*Food Estate: Menanam Kehancuran, Menuai Krisis Iklim*”. Informasi ini bertujuan membuka wacana kritis terhadap proyek yang sebelumnya di presentasikan positif oleh negara. Greenpeace juga menyampaikan informasi – informasi tersebut dalam situs interaktif “Kuak katak di

musim kering” sebagai representasi visual dan naratif dari suara masyarakat lokal yang terdampak melalui peta, dokumentasi foto, dan kesaksian warga lokal, situs ini menggambarkan kerusakan lahan gambut dan konversi hutan akibat program food estate.

- 2) *Symbolic Politics*; Informasi – informasi tersebut dikemas menjadi suatu simbol yang nyata dan menyadarkan khalayak akan dampak *food estate*. Informasi tersebut dibingkai dalam kampanye visual seperti video dokumenter berjudul “Deforestasi Food Estate Jokowi: Hutan Rusak, Banjir di Desa-Desa”, aksi bentang spanduk bertuliskan “*Food Estate Feeding Climate Crisis*”, hingga aksi teatrikal “Makan Siang Presiden dan Tiga Capres” di lahan gersang *food estate*. Melalui visualisasi informasi tersebut, Greenpeace menggugah opini publik moral dan emosional tentang ketidakadilan proyek ini.
- 3) *Leverage Politics*; Greenpeace membawa proyek *food estate* ini dalam forum internasional seperti di COP 27 dan COP 28, Greenpeace menyinggung proyek tersebut agar tidak teruskan dengan dalih mencegah krisis pangan. Isu ini disinggung sebagai contoh kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan dan justru merusak alam , sehingga menciptakan tekanan moral dan diplomatik terhadap pemerintah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Analisadaily.com. (2024). *Food Estate_ Solusi Ketahanan Pangan atau Ancaman Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat_ - Ragam - AnalisaDaily*.
- Ardi Saputra. (2021). *Opini: Tantangan Program Food Estate, dalam Menjaga Ketahanan Pangan – kab.faperta.ugm.ac.id*.
<https://kab.faperta.ugm.ac.id/2021/11/11/opini-tantangan-program-food-estate-dalam-menjaga-ketahanan-pangan/>
- Borneo, S. O. (2023). *Food Estate Gagal, Masih Mau Dilanjutkan_ _ Save Our Borneo*.
- Carebesth, S., & Bahari, S. (2012). Merauke Integrated Food And Energy Estate (MIFEE) Berkah atau Bencana Bagi Rakyat Papua? *Bina Desa: Pembaharuan Agraria*, 1–7. <http://binadesa.org/wp-content/uploads/2013/08/MIFEE-Berkah->

atau-Bencana-bagi-Rakyat-Papua.pdf

Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan & Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan. (2020). Pemulihan ekonomi nasional. In *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html#:~:text=Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan,mulai terasa pada triwula>

Dwiguna, A. R., & Munandar, A. I. (2020). Analisis Naratif Kebijakan Pangan Nasional Melalui Program Food Estate. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 273.
<https://doi.org/10.33772/publica.v11i2.15080>

Galudra, G., van Noordwijk, M., Idris, S., & Pradhan, U. (2010). Hot Spot of Emission and Confusion: Land Tenure Insecurity, Contested Policies and Competing Claims in the Central Kalimantan Ex-Mega Rice Project Area. *Working Paper*, 98, 1–40.

Ginting, L., & Pye, O. (2013). *Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia*. 6(1), 160–182.

Global Food Security Cluster. (2023). *Cluster Coordinator*. January.

Greenpeace.co.id. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut Kalimantan Tengah, Jangan Menciptakan Malapetaka Baru! In *Greenpeace Indonesia*.
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5213/koalisi-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru/>

Greenpeace.co.id. (2023). *kuak katak dimusim kemarau*.

Greenpeace. (2007). *The roots of Greenpeace — Rex Weyler - Greenpeace International*.

Greenpeace. (2022). Find a Greenpeace organisation. In *Greenpeace*.
<https://www.greenpeace.org/international/about/worldwide/>

- Greenpeace Indonesia. (2022). *Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim*. 1–100.
- Greenpeace International. (2022). Indonesian government only feeding food insecurity by clearing forests in food estate plan. In *Greenpeace*.
<https://www.greenpeace.org/international/press-release/56573/indonesian-government-only-feeding-food-insecurity-by-clearing-forests-in-food-estate-plan/>
- Greenpeace Indonesia. (2022). Pemerintah Indonesia Hanya Memberi Makan Krisis Iklim Lewat Food Estate. In *Greenpeace.org*.
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55727/pemerintah-indonesia-hanya-memberi-makan-krisis-iklim-lewat-food-estate/>
- Indonesia, D. (2022). *COP27_ Mencegah Kelaparan Dunia akibat Perubahan Iklim – DW – 15*.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *Globalization: Causes and Effects*, 221–233.
- Kamin, A. B. M., & Altamaha, R. (2019). Modernisasi tanpa Pembangunan dalam Proyek Food Estate di Bulungan dan Merauke. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 163–179.
- Kompas.com. (2021). *Kebun Singkong 600 Hektar di Gunung Mas - Kompas*.
- Kompas.com. (2023). *Aktivist _Food Estate_ Potret Kegagalan Pemerintah Jaga Komitmen Iklim Halaman all - Kompas*.
- Liputan 6. (2024). *Memahami Program Food Estate_ Upaya Strategis untuk Ketahanan Pangan Indonesia - Feeds Liputan6*.
- Masterplandes.com. (2025). *Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Food Estate_ Solusi atau Tantangan Baru_ – masterplandes*.
- Mongabay. (2020). Food Estate Melaju di Tengah Banjir Kritik - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id. In *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2020/09/30/food-estate-melaju-di-tengah-banjir-kritik/>
- Neilson, J., & Wright, J. (2017). The state and food security discourses of Indonesia:

feeding the bangsa. *Geographical Research*, 55(2), 131–143.

<https://doi.org/10.1111/1745-5871.12210>

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2020). Upaya Optimalisasi Potensi Pajak Shadow Economy Tantangan Program Food Estate dalam Menjaga Ketahanan Pangan Upaya Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Melalui Dana PK2UKM. *Buletin APBN*, V(16), 7–10.

Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1), 36–68.

<https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>

Rozaki, Z. (2020). COVID-19 , Agriculture , dan Food Security inIndonesia. In *Reviews in Agricultural Science* (Vol. 8, pp. 243–260).

SEIJ.or.id. (2025). *Dampak Lingkungan dan Sosial Food Estate Merauke _ SIEJ - Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia*.

Setyo, P., & Elly, J. (2018). Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 147(1).

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/147/1/012043>

Suriadikarta, D. A. (2009). Pembelajaran dari kegagalan penanganan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 2(984), 229–242.

<http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/ip024091.pdf>

Susanto, S. R. (2007). The Transformation of Greenpeace Strategy in the 1990s : From Civil Disobedience to Moderate Movement. *Global & Strategic*, 2, 186–205.